

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sejarah politik yang cukup panjang dan mengalami perkembangan menarik. Setelah lebih dari tiga abad mengalami penjajahan, lewat perjuangan yang gigih dari para pahlawan, akhirnya kemerdekaan dapat diraih. Tetapi, kemerdekaan yang didapatkan itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, malah kemerdekaan itu menjadi pintu gerbang perjuangan yang lebih berat lagi. Berbagai masalah silih berganti dihadapi oleh bangsa Indonesia, mulai dari ketidaksetujuan penjajah terhadap kemerdekaan Indonesia dan tetap ingin menguasai negeri ini, hingga masalah yang timbul dari dalam negeri sendiri.

Semua masalah berat tersebut mampu dilalui bangsa Indonesia dan kemerdekaan dapat dipertahankan. Ancaman dalam negeri yaitu komunis yang sempat dihadapi Indonesia semasa kepemimpinan Soekarno juga dapat diatasi, walaupun membawa sebuah perubahan yaitu turunnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Sejak itulah rezim berganti, dari pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno yang kemudian disebut dengan Orde Lama berganti menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto yang disebut dengan Orde Baru.

Demokrasi sebagai sistem yang secara tertulis dinyatakan sebagai sistem politik yang berlaku di Indonesia, ternyata tidak dapat terlaksana sepenuhnya. Sebenarnya, sejak awal Indonesia telah dibangun dengan impian

membangun negara kebangsaan modern dengan model Amerika Serikat. Agaknya, Bung Karno dan tokoh lainnya terkesan oleh pernyataan Presiden Franklin Delano Roosevelt yang bercita-cita mengakhiri semua bentuk kolonialisme segera setelah Perang Dunia II selesai.¹

Soekarno dan angkatannya, oleh berbagai kalangan, dianggap tidak berhasil mewujudkan wawasan tersebut. Meskipun demikian, Soekarno termasuk presiden yang menunjukkan sikap yang keras terhadap intervensi-intervensi negara luar, terutama negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang disegani di negara-negara Asia, karena perannya dalam menginspirasi kemerdekaan negara-negara di wilayah Asia dan Afrika. Soekarno berani menunjukkan sikap tegas dan percaya diri dalam menghadapi negara-negara tersebut. Soekarno juga dikenal dekat dengan Rusia dan Cina. Oleh karena itu, Soekarno dikenal sebagai sosok yang terlalu kompleks, karena dipuja dan dikecam.²

Sikap kontroversial Soekarno itulah yang agaknya menjadi penyebab berakhirnya kekuasaannya di Indonesia. Pihak-pihak yang tidak suka dengan Soekarno berusaha mengakhiri kepemimpinannya. Menurut pengikut setianya, seperti dikemukakan Andrew Kamal, Soekarno jatuh karena dikudeta diam-diam. Menurut mereka, peristiwa 30 September 1965 adalah sebuah kecelakaan sejarah yang diskenariokan oleh negara-negara asing, terutama Barat, yang tidak suka dengan peran Indonesia di dunia baru.³

¹ Tim Penulis, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia* (Sweden: International IDEA, 2000), x.

² Andrew Kamal, *Spirit 5 Presiden RI* (Yogyakarta: Syura Media Utama, 2012), 20-21.

³ *Ibid.*, 21-22

Perubahan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan peristiwa G30S/PKI yang diikuti dengan keluarnya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) pada tanggal 11 Maret 1966. Berdasarkan Supersemar tersebut, Letjen Soeharto atas nama Presiden/Panglima Tertinggi mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi. Selain itu, surat itu juga berisi perintah untuk menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Soekarno, serta menjamin keutuhan bangsa dan negara.⁴

Pada masa Orde Baru inilah, terjadi beberapa kali Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu pada masa Orde Baru dilaksanakan sebanyak enam kali. Pemilu pertama yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 1968, ternyata baru dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Pemilu tersebut diikuti oleh 10 partai dimana Golkar memenangkan Pemilu dengan memperoleh 236 kursi dari 360 kursi. Pemilu kedua dilaksanakan tahun 1977 yang diikuti 3 partai politik yaitu Golkar, PPP, dan PDI, dan Pemilu tersebut dimenangkan oleh Golkar. Pemilu ketiga berlangsung tahun 1982 dengan 3 partai dan kembali dimenangkan oleh Golkar. Pemilu keempat tahun 1987 tetap diikuti 3 partai dan lagi-lagi Golkar muncul sebagai pemenang. Pemilu kelima tahun 1992 masih diikuti 3 partai dengan Golkar sebagai pemenang. Pemilu terakhir pada masa Orde Baru berlangsung pada tahun 1997 dengan Golkar sebagai pemenang. Pada keenam Pemilu tersebut dimenangkan oleh Golkar, sehingga

⁴ A Kardiyat Wiharyanto, *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011), 170.

Presiden Soeharto yang diusung oleh Golkar berhasil memenangkan keenam Pemilu tersebut dan menjadi Presiden Indonesia selama 32 tahun.⁵

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto ditandai dengan adanya krisis moneter, yang bermula dari krisis moneter yang melanda Thailand awal Juli 1997. Krisis moneter yang melanda Thailand itu dengan cepat menggoyang nilai tukar dari mata uang negara-negara tetangganya, salah satunya Indonesia.⁶ Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar benar-benar berefek besar terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Harga-harga meningkat drastis bahkan diikuti dengan kelangkaan barang terutama sembako. Masyarakat menghadapi kondisi yang sangat sulit dan ancaman kelaparan terjadi di mana-mana. Kondisi tersebut menimbulkan perhatian dari IMF yang berusaha membantu Indonesia dengan memberikan bantuan dengan syarat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi krisis itu. Tetapi ternyata pemerintah tidak mampu mengatasi krisis itu dan malah membuat kebijakan-kebijakan yang malah memperburuk suasana.

Krisis tersebut sepertinya tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Amerika Serikat, sebagaimana yang dikemukakan Amien Rais dalam bukunya *Selamatkan Indonesia*. Setelah Perang Dunia II, kekuatan ekonomi Amerika adalah yang terkuat di dunia. Amerika Serikat pasca perang dingin⁷,

⁵ Ibid., 186-188.

⁶ James Luhulima, *Hari-hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Peristiwa Terkait* (Jakarta: Kompas, 2001), 78.

⁷ Perang dingin berlangsung antara akhir 1940-an sampai sekitar 1991. Amerika Serikat menjadi pemenangnya dan Uni Soviet bubar. Stamina politik dan ekonomi Uni Soviet kalah tangguh dibanding Amerika. Apalagi, perang dingin telah menelan biaya milyaran dollar. Perlombaan senjata tanpa batas dengan Amerika juga menguras kekuatan ekonomi Soviet. Disamping itu, keresahan negara-negara bagian Uni Soviet, seperti negara-negara Eropa Timur dan Jerman Timur terus bergejolak ingin melepaskan diri. Oleh karena itu, keruntuhan Uni Soviet akhirnya menjadi

sebagai negara pemenang, mencari posisi baru yang tepat untuk mengelola kemenangannya dalam jangka panjang. Seluruh presiden Amerika ingin agar AS menjadi pemimpin dunia baik secara politik maupun ekonomi. IMF dan WTO merupakan sebagian upaya untuk mewujudkan keinginan tersebut. Aturan-aturan ekonomi yang disarankan IMF dan WTO serta bantuan yang diberikan juga merupakan upaya untuk menimbulkan ketergantungan negara-negara yang dibantu agar lemah secara ekonomi sehingga tunduk dan tergantung pada negara-negara yang kuat yaitu AS. Ketergantungan tersebut pada akhirnya membuat AS dapat melakukan intervensi pada politik dalam negeri negara tersebut.⁸

Morat-maritnya perekonomian Indonesia, melambung tingginya harga barang-barang, meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan menyempitnya kesempatan kerja, memancing mahasiswa untuk mengadakan aksi keprihatinan. Pada awalnya, aksi keprihatinan itu hanya digelar di lingkungan kampus dan hanya diikuti oleh beberapa mahasiswa. Hanya sesekali ada sekelompok mahasiswa yang datang ke DPR dan menggelar aksi di sana. Baru pada bulan Januari 1998, jumlah mahasiswa yang berpartisipasi dalam aksi-aksi keprihatinan meningkat menjadi ratusan orang serta melibatkan dosen dan alumni.⁹

kenyataan. Lihat M. Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia* (Yogyakarta: PPSK Press, 2008), 55-56.

⁸ Ibid., 55-57. Analisis lain mengenai ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju dapat dilihat dalam Sritua Arief dan Adi Sasono, *Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan* (Jakarta: Mizan, 2013).

⁹ Ibid., 83.

Aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat intensitasnya ketika presiden Soeharto terpilih kembali sebagai presiden untuk ketujuh kalinya, masa bakti 1998-2003, pada tanggal 11 Maret 1998. Mahasiswa menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya.¹⁰ Puncak dari aksi-aksi tersebut terjadi pada bulan Mei. Pada bulan itu pula terjadi peristiwa tragis tewasnya empat mahasiswa Trisaksi yang tertembak aparat keamanan di dalam kampusnya. Peristiwa tersebut memicu aksi-aksi yang lebih besar dan kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat. Akhirnya, Presiden Soeharto yang sedang berada di Cairo, Mesir, pada tanggal 13 Mei 1998 malam menyatakan siap mundur dari jabatan presiden. Tetapi, ketika kembali ke Indonesia pernyataan itu dibantahnya. Hal itu tentu saja semakin memicu kemarahan mahasiswa dan menimbulkan aksi-aksi yang lebih besar lagi, bahkan Gedung MPR/DPR berhasil mereka duduki. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.¹¹

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama mayoritas, sudah sepatutnya menunjukkan suatu peran atau pengaruh yang besar pada kehidupan bernegara di Indonesia. Hubungan Islam dan negara di Indonesia, terutama pasca kemerdekaan, pada waktu-waktu tertentu dapat dikatakan kurang harmonis. Secara umum, peristiwa-peristiwa parlementer maupun nonparlementer yang terkait dengan Islam dan negara ikut menciptakan suasana ketidakharmonisan tersebut.¹²

¹⁰ Ibid., 84

¹¹ Ibid.

¹² Taufiq Nugroho, *Islam dan Negara Pancasila* (Yogyakarta: PADMA, 2003), 23.

Pada satu sisi, Islam menghendaki negara dan masyarakat Indonesia diatur berdasarkan agama Islam. Kalaupun tidak demikian, Islam menuntut tatanan hidup masyarakat yang sesuai dengan tuntunan etika dan moral agama yang diyakini berasal dari Tuhan dan bersifat abadi.¹³ Situasi seperti itu jelas menimbulkan banyaknya ketidakharmonisan antara Islam dan negara. Oleh karena itu, dalam sejarah Indonesia menunjukkan hubungan yang *fluktuatif* antara Islam dan Negara. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Islam tidak dapat menunjukkan peran yang besar terhadap persoalan kenegaraan atau politik Indonesia.

Sebelum 1998, Indonesia mengalami situasi politik yang sulit bagi Islam. Aspirasi politik ditekan dan kebebasan dihalangi. Gerakan Islam merupakan salah satu kelompok yang paling ketat diawasi pemerintahan Soeharto, khususnya selama dekade 1980-an. Ratusan pemimpin Islam dipenjara dan ribuan lainnya masuk dalam daftar pengawasan pemerintah. Organisasi-organisasi Islam diawasi dan diminta untuk mengubah platform mereka dari Islam menjadi Pancasila. Organisasi yang menolak dibubarkan dan pemimpinnya diawasi, jika tidak ditangkap dan diinterogasi dengan keji. Sama seperti rezim-rezim otoriter di negara-negara muslim lainnya, Soeharto menerapkan politik represif pada kelompok-kelompok Islam.¹⁴

Sebenarnya, pada masa-masa akhir pemerintahan Soeharto, mulai terlihat upaya-upaya untuk menciptakan situasi politik yang lebih baik antara

¹³ Ibid.

¹⁴ Luthfi Assyaukanie, "Islam Politik di Indonesia dan Mesir: Sebuah Perbandingan", Makalah disajikan dalam Diskusi "Islam Politik di Timur Tengah dan Indonesia", Komunitas Salihara, Jakarta, 25 Januari 2012.

negara dan Islam. Diawali pada periode Kabinet Pembangunan V (1988-1993) dan diteruskan pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998), kebijakan politik Mandataris MPR yang akomodatif terhadap Islam memang dapat dilihat dan dirasakan. Islam dan umat tidak “lagi” dipinggirkan dan disudutkan dari kekuasaan politik, sehingga ajaran-ajarannya mulai dirasakan manfaatnya bagi kepentingan pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia.

Mendekatnya Soeharto ke Islam adalah realitas politik yang dihadapi pada masa ini. Menurut sejumlah pengamat, bergesernya sikap politik Soeharto yang lebih cenderung ke Islam memunculkan tiga kemungkinan. Pertama, adanya kooptasi pemerintah terhadap umat Islam. Pemerintah sebagai subyek menjadikan umat Islam sebagai obyek dan dimanfaatkan untuk tujuan politiknya. Kedua, adanya akomodasi pemerintah terhadap umat Islam. Pemerintah menyadari akan kekeliruannya di masa lalu. Sebagai balasannya, pemerintah mengakomodasi kepentingan umat Islam dengan cara mendekati, merangkul umat Islam dan memberikan tempat yang layak di dalam *inner circle* kekuasaan. Ketiga, suatu bentuk integrasi umat ke pemerintah. Di sini posisi umat sebagai pihak yang pro-aktif terhadap pemerintah. Umat Islam sebagai subyek melakukan integrasi ke dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini dapat juga dibaca sebagai keberhasilan umat Islam membuat jaringan dakwah hingga menembus lapisan kekuasaan tertinggi, yakni presiden.¹⁵

¹⁵ “Romantika Politik Islam Masa Orde Baru”, *Bila Sejarah yang Bicara online*, <http://www.serbasejarah.wordpress.com>, 17 Desember 2009, diakses tanggal 4 Februari 2013.

Belum habis periode “bulan madu” akomodatif kalangan “politik Islam” oleh negara (Orde Baru) yang berlangsung sejak akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an, tiba-tiba saja situasi politik berubah menjadi sangat membingungkan dengan jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Soeharto, yang pada awalnya dipahami oleh kalangan Islam politik sebagai “pintu”, “instrumen”, bahkan “patron” dalam upaya memperbesar akomodasi dan representasi politik Islam, tiba-tiba diposisikan sebagai musuh bersama publik, bahkan oleh sebagian besar kalangan Islam sekalipun. Eep Saefulloh Fatah menilai bahwa partisipasi politik umat Islam masa reformasi berangkat dari kebingungan terhadap peran dan aksi apa yang harus diambil, sehingga terjadi “kekeliruan politik kalangan Islam” yang sebetulnya bukan sebagai kekeliruan baru tetapi kekeliruan lama yang berulang, akibatnya kalangan Islam tetap “Gapol” atau gagap politik.¹⁶

Berbagai kelompok Islam yang berusaha berpartisipasi dalam politik Indonesia, mengalami kesulitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat Soeharto. Salah satu aliran yang berkembang di Indonesia, yaitu Islam tradisionalis juga merasakan perlakuan tersebut, walaupun tak separah kelompok lain yang cenderung lebih keras pemikirannya. Hal tersebut mungkin disebabkan karena corak pemikiran dan gerakan Islam tradisionalis yang tidak terlalu ekstrim dan dianggap tidak terlalu mengancam pemerintahan Soeharto.

¹⁶ Ibid.

Islam tradisionalis merupakan salah satu corak paham ke-Islam-an yang paling populer dan banyak dianut oleh masyarakat Islam Indonesia. Kaum orientalis Barat menyebut kaum tradisionalis sebagai orang yang berpegang teguh kepada al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah SAW. Hal yang demikian itu mereka dasarkan pada pandangan bahwa al-Qur'an merupakan warisan ajaran dari Tuhan yang bersifat abadi, sedangkan Sunnah merupakan warisan ajaran dari Nabi Muhammad SAW., sehingga keduanya harus dipegang teguh oleh umat Islam sepanjang zaman.¹⁷

Menurut Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, sebagaimana yang dikutip oleh Syarif Hidayatullah, pola pikir tradisionalisme dalam Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi umum masyarakat yang ketika Islam masuk adalah masyarakat petani yang tinggal di pedesaan, sehingga tidak memungkinkan Islam untuk berkembang secara lebih rasional dan modern. Karenanya paham *Syafiiyah*, sebagai paham yang dianut kalangan Islam tradisionalis yang berkembang di Indonesia, lebih menekankan aspek loyalitas terhadap pemuka agama, seperti ulama dan kiai, daripada kepada substansi ajaran Islam yang bersifat rasionalistis. Tidak heran, bila kemudian kebiasaan yang berkembang di kalangan Islam tradisionalis adalah sikap *taqlid* (mengekor), sehingga pada taraf tertentu menimbulkan sikap patuh dan taat tanpa syarat kepada para ulama dan kiai yang diikutinya.¹⁸

¹⁷ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), 139-142.

¹⁸ Syarif Hidayatullah, *Islam "Isme-isme" : Aliran dan Paham Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 47-50.

Situasi kalangan Islam yang mengalami kegagalan dalam tindakan politik setelah berakhirnya Orde Baru, tidak membuat perkembangan pemikiran politik Islam berhenti. Pemikiran politik Islam justru semakin berkembang dengan muncul berbagai pendapat mengenai politik Islam. Pemikiran-pemikiran yang berusaha merubah politik Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbesar di Indonesia.

Islam tradisionalis merupakan salah satu aliran pemikiran Islam yang juga memberikan perhatiannya pada politik negara. Selain itu, Islam tradisionalis juga memiliki sejarah hubungan yang baik dengan pemerintah, sehingga memungkinkan untuk memberikan pengaruh pada politik Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran politik Islam yang muncul dari Islam tradisionalis terus berkembang hingga saat ini.

Gerakan Islam di Indonesia yang pernah berada atau masih bertahan pada jalur tradisional diantaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU), tarikat Qadiriyyah Naqsyabandiyah, dan gerakan Jama'ah Tabligh. Tetapi, gerakan Islam tradisionalis yang akan dibahas di sini adalah Nahdlatul Ulama (NU). Nahdlatul Ulama dipilih karena, diantara ketiga gerakan Islam tradisionalis tersebut, NU memiliki jumlah anggota yang sangat besar dibanding dua gerakan Islam tradisionalis lainnya, bahkan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya.

Islam tradisionalis, dalam hal ini Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi keagamaan yang memiliki basis massa yang sangat besar Indonesia, tentu saja memiliki pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu,

Islam tradisionalis sejak awal pendiriannya telah menunjukkan pengaruh dan partisipasi yang besar pada perpolitikan Indonesia. Meskipun pada pertengahan Orde Baru, gerak politik Islam tradisionalis sempat dibatasi oleh pemerintah, Islam tradisionalis tetap menunjukkan kontribusi-kontribusinya pada politik Indonesia. Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, Islam tradisionalis juga menunjukkan berbagai pemikiran dan tindakan dalam politik Indonesia. Oleh karena itu, mengetahui perkembangan pemikiran Islam tradisionalis mengenai politik, ditengah berbagai gejolak dan perkembangan pemikiran yang ada pada Islam tradisionalis, menjadi suatu hal yang menarik. Berangkat dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat Islam tradisionalis sebagai objek penelitian dengan judul “ARTIKULASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA PASCA ORDE BARU (Kajian terhadap Pemikiran Islam Tradisionalis)”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan konteks permasalahan di atas, maka peneliti dapat menspesifikkan permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini kedalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah situasi dan kondisi politik di Indonesia pasca Orde Baru?
2. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan Islam Tradisionalis di Indonesia?
3. Bagaimanakah artikulasi politik Islam Tradisionalis di Indonesia pasca Orde Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan secara lebih dalam situasi dan kondisi politik di Indonesia pasca Orde Baru.
2. Untuk mendeskripsikan sejarah dan perkembangan Islam Tradisionalis di Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang artikulasi politik Islam Tradisionalis di Indonesia pasca Orde Baru.

D. Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan keilmuan peneliti tentang masalah isu-isu kontemporer yang menjadi permasalahan Islam, khususnya yang berhubungan dengan Islam, politik, dan negara.
2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan referensi bagi khazanah intelektual pendidikan, khususnya Program Studi Perbandingan Agama Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri.
3. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya mahasiswa, yaitu sebagai bahan informasi bagi

mahasiswa tentang wacana Islam kontemporer. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui problem-problem keagamaan dalam Islam.

4. Hasil atau *output* dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perkembangan politik Islam di Indonesia pasca Orde Baru. Dimana politik merupakan salah satu hal yang cukup mendapat perhatian masyarakat Indonesia, termasuk perkembangan politik yang muncul.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini, telaah pustaka sangat diperlukan untuk memposisikan penelitian yang dilakukan dan untuk mencari ide dasar penelitian dan teori yang telah digagas oleh peneliti, pengamat dan siapapun yang pernah fokus dalam melakukan penelitian ini, baik dari segi topik, perspektif, pendekatan, dan lain sebagainya pada kurun waktu yang telah lalu.

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian yang sama persis sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti hingga saat ini belum ada. Namun, setidaknya terdapat penelitian-penelitian yang banyak dilakukan oleh para ahli namun bentuknya masih parsial, yang artinya membahas pada bagian-bagian tertentu dari objek yang ada pada penelitian ini. Ada pula yang membahas politik Islam di Indonesia pasca Orde Baru, tetapi tidak secara spesifik mengarah pada pemikiran aliran tradisionalis yang akan dibahas dalam penelitian ini, atau dapat dikatakan masih membahas politik Islam di Indonesia secara umum.

Penelitian lain yang juga mengangkat tema Islam dan politik adalah skripsi yang berjudul *Reposisi Islam dalam Paradigma Politik Indonesia Menjembatani Islam dan Negara* karya Baihaqi dari STAIN Kediri pada tahun 2001. Dalam skripsi tersebut, memaparkan tentang dinamika Islam politik dalam sejarah politik Indonesia, format Islam politik, dan perkembangan partai politik di Indonesia.¹⁹

Skripsi lain yang juga membahas Islam dan politik adalah skripsi yang berjudul *Relasi Islam dan Negara di Indonesia* yang ditulis oleh Muawanah pada tahun 2004 dari STAIN Kediri. Dalam skripsi tersebut, menjelaskan bentuk relasi Islam dan negara di Indonesia. Peluang dan tantangan yang harus dihadapi Islam dalam dunia politik Indonesia juga dijelaskan dalam skripsi tersebut. Dimana peluangnya terletak pada konsep Islam yang pada dasarnya memberikan prinsip-prinsip dasar negara. Sementara tantangannya terletak pada kondisi kultural Indonesia yang seringkali tidak mendukung perkembangan politik Islam di Indonesia.²⁰

Dari beberapa skripsi yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di atas masih berfokus pada masalah yang umum, seperti politik Indonesia secara umum atau membahas hubungan Islam dan negara secara umum. Sedangkan, penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih fokus pada artikulasi politik Islam tradisional di Indonesia. Islam tradisional yang

¹⁹ Baihaqi, "Reposisi Islam dalam Paradigma Politik Indonesia Menjembatani Islam dan Negara", Skripsi tidak diterbitkan (Kediri: Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri, 2001), 20-35.

²⁰ Muawanah, "Relasi Islam dan Negara di Indonesia", Skripsi tidak diterbitkan (Kediri: Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri, 2004), 15-38.

dimaksud dalam penelitian ini juga dikhususkan pada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam tradisional yang memiliki basis massa yang besar di Indonesia.

F. Kajian Teoritik

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori kritis sebagai landasan dalam mengkaji masalah yang diteliti yaitu pemikiran politik Islam Tradisionalis. Teori kritis adalah teori yang tidak bersifat kontemplatif atau hanya menjadi lamunan para filsuf seperti pemikiran falsafi yang tradisional, sehingga teori kritis tidak jauh dari kehidupan masyarakat yang nyata. Teori kritis adalah teori yang emansipatoris yaitu teori yang ingin mengembalikan kemerdekaan dan masa depan manusia. Ciri khas dari teori kritis adalah objek yang dikritik bukanlah kekurangan-kekurangan di sana-sini, melainkan keseluruhannya. Teori kritis berusaha mengungkap berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia.²¹

Politik merupakan hal yang cukup penting dalam kehidupan manusia khususnya bagi manusia yang hidup di suatu negara. Politik juga bukan merupakan suatu hal yang baku sehingga muncul berbagai pendapat mengenai politik. Pemikiran itu muncul dari berbagai kalangan, mulai dari filsuf, negarawan, budayawan, bahkan agamawan. Konsep mengenai politik juga banyak terkandung dalam kitab suci berbagai agama, salah satunya Islam. Tetapi, Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam tidak memberikan

²¹ Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta : Kanisius, 1992), 160-162.

tuntunan berpolitik secara rinci dan hanya sebatas pedoman umum. Oleh karena itu, muncul berbagai pemikiran tentang politik Islam.

Keragaman pemikiran tentang politik merupakan suatu hal yang wajar terjadi pada masalah yang dekat dengan kehidupan masyarakat yang plural. Hannah Arendt²² berasumsi bahwa ada prioritas dan otonomi bagi politik. Arendt tidak percaya bahwa ruang publik dan ruang privat sama sekali tidak berhubungan. Arendt berpendapat, ada prinsip-prinsip dan motif yang berbeda bagi tindakan politik. Arendt bisa mengerti bahwa tindakan politik bisa identik dengan kebebasan untuk bertindak dengan pihak lain secara jamak untuk membawa sesuatu yang baru ke dalam dunia. Memang, pluralitas semacam ini, menurut Arendt, adalah syarat khusus bagi semua kehidupan politik yang selanjutnya disebut sebagai “Pluralitas Politik”.²³

Demikian pula politik yang berkembang di Indonesia, berbagai pemikiran politik muncul dalam kehidupan politik di Indonesia. Pluralitas politik – seperti yang diungkapkan Arendt – benar-benar terjadi di Indonesia dan pemikiran itu muncul dari berbagai pihak dan golongan. Islam juga memunculkan berbagai pemikiran politik dari berbagai aliran pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Salah satu dari aliran pemikiran Islam tersebut adalah Islam tradisionalis. Islam tradisionalis yang merupakan aliran yang

²² Hannah Arendt (1906-1975) adalah salah satu pemikir politik yang paling penting dari abad kedua puluh. Dia jadi terkenal karena studi monumentalnya *The Origins of Totalitarianism* (1966), karena diagnosisnya tentang politik dan masyarakat modern dalam *The Human Condition* (1958), dan karena memadukan istilah “*the banality of evil*” untuk menggambarkan penjahat perang Nazi dalam bukunya yang paling kontroversial, *Eichmann in Jerusalem* (1968). Lihat Patricia Owens, “Hannah Arendt”, dalam *Teori-teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*, ed. Janny Edkins dan Mck Vaughan-Williams, terj. Teguh Wahyu Utomo (Yogyakarta : BACA, 2010), 39.

²³ *Ibid.*, 47.

cukup populer di Indonesia dan banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia tentu memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia.

Hubungan agama dengan politik atau negara bukanlah suatu hal yang baru, telah banyak pendapat mengenai hubungan agama dengan negara. Salah satu pendapat tersebut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Hamka. Hamka²⁴ mengemukakan titik pemikirannya pada penyatuan antara agama dan negara, karena di satu sisi, negara sangat membutuhkan agama sebagai fundamen utama dalam upaya pembentukan moralitas suatu bangsa yang sangat urgen bagi kelangsungan hidup suatu negara. Tetapi di sisi lain, agama juga membutuhkan negara sebagai faktor utama bagi eksistensi dan pengembangan agama itu sendiri, demi terwujudnya suatu hubungan yang benar dalam berbagai urusan.²⁵

Suatu negara akan mengalami keruntuhannya ketika penduduk negara itu sudah melalaikan apa yang disebut dengan nilai-nilai keagamaan dan moralitas yang sebenarnya menjadi tugas agama untuk menegakkan dalam suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶ Hubungan agama dan negara sama sekali tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berhubungan timbal-balik secara seimbang. Agama membutuhkan negara untuk

²⁴ Hamka mempunyai nama asli H. Abdul Malik bin Abdul Karim Amirullah. Dia lahir di Sungai Batang, Maninjau, pada 17 Februari 1908 bertepatan dengan 14 Muharram 1320 Hijriyah. Hamka merupakan figure terkemuka dalam perjuangan revolusioner merebut kemerdekaan nasional di Sumatera Barat dari tahun 1945 sampai 1949. Pada tahun 1950, dia pindah ke Jakarta dan diangkat sebagai pejabat tinggi Depag. Lihat Ahmad Hakim dan M. Thalhah, *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 25-27.

²⁵ Ibid., 80-81.

²⁶ Ibid., 82.

mengembangkan dirinya, dan negara meniscayakan agama sebagai kontrol atas etika dan moral, yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam sebuah sistem simbiosis mutualisme.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data di perpustakaan tentang objek penelitian yang sedang diteliti.²⁸ Jenis penelitian ini dipilih, karena data yang diperlukan untuk mengkaji artikulasi politik Islam tradisionalis di Indonesia pasca Orde Baru yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, banyak terdapat di perpustakaan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk ke dalam kategori pendekatan “kualitatif”,²⁹ yang menunjuk kepada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, yang dapat berupa ungkapan, catatan atau tingkah laku serta mengarah kepada keadaan-keadaan dan individu-individu secara holistik. Pokok kajiannya, baik sebuah organisasi maupun individu tidak akan direduksi kepada

²⁷ Ibid., 64.

²⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 93.

²⁹ Penelitian kualitatif cenderung memiliki beberapa karakteristik, di antaranya: memiliki natural setting sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses daripada produk, cenderung menghasilkan data secara induktif, serta makna (*meaning*) menjadi hal yang esensial. Lihat, Robert C. Bodgan and Sari Knoop Bicen, *Quality Research for Education: an Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1986), 29.

variabel yang telah ditata, atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya, akan tetapi akan dilihat sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.³⁰ Jadi, artikulasi politik Islam tradisionalis di Indonesia pasca Orde Baru yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, akan dikaji secara utuh, bukan secara parsial atau sektoral.

2. Sumber Data

Sesuai dengan judul penelitian ini, “ARTIKULASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA PASCA ORDE BARU (Kajian terhadap pemikiran Islam Tradisionalis)” dan mengingat penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang digunakan adalah buku-buku ataupun literatur yang berupa artikel, majalah ataupun data dari situs-situs internet.

a. Sumber Primer

Adapun buku-buku yang digunakan sebagai sumber primer atau bahan rujukan utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku karya Kacung Marijan yang berjudul *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta : Kencana, 2011.
- 2) Buku karya Bachruddin Jusuf Habibie yang berjudul *Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: THC Mandiri, 2006.

³⁰Robert C. Bodgan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*. terj. A. Khozin Affandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 30.

- 3) Buku karya Laode Ida yang berjudul *NU MUDA: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- 4) Buku karya Ali Masykur Musa yang berjudul *Nasionalisme di Persimpangan*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- 5) Buku karya Abdurrahman Wahid yang berjudul *Islamku Islam Anda Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

b. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti tentu akan menggunakan berbagai sumber rujukan yang dipandang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti. Sumber tersebut bisa berupa buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, ataupun sumber-sumber bacaan yang diperoleh dari situs-situs internet yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk membahas masalah yang dikaji dalam penelitian ini dan sebagai bahan objektifitas materi yang diperlukan dalam konteks penelitian kajian pustaka, maka peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi,³¹ yaitu mencari data mengenai hal-hal terkait dengan variabel penelitian baik itu berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, makalah,

³¹ Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri, 2009), 31

surat kabar, notulensi rapat, agenda, atau keputusan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

Metode dokumentasi digunakan karena jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Dengan metode ini, data-data yang diperoleh dari sumber-sumber data, dikelompokkan sesuai dengan tema-tema yang ada di dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan proses analisis data dapat dilakukan dengan mudah, karena data telah didokumentasikan dan dikelompokkan kedalam tema-tema tertentu.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu berupa proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan melalui langkah-langkah yang meliputi penggolongan data dalam pola, tema, sampai dengan penafsiran data, sehingga dapat memberi makna yang menjelaskan pola dan mencari hubungan antara berbagai konsep dalam penelitian.³² Spradley menyatakan bahwa :

Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.³³

Semua informasi dan data yang diperoleh diproses melalui beberapa tahapan dan kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori atau topik-topik dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif.

³²S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarasito, 1992), 126.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: ALFABETA, 2011), 332-333.

Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu gejala sosial yang teramati pada suatu daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti.³⁴ Pemilihan metode ini atas pertimbangan bahwa data primer yang diperlukan merupakan data kualitatif. Data primer yang merupakan data kualitatif diperoleh langsung dari perpustakaan.

Fakta-fakta yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah pemikiran politik Islam tradisional di Indonesia pasca Orde Baru. Melalui proses tersebut, data kemudian disederhanakan ke dalam ciri-ciri tertentu dengan memperhatikan tema-tema yang menonjol dan mencuat dari subjek penelitian. Hasil penelitian ini kemudian disajikan secara verbal, dan dikonfirmasi dengan kerangka teoritik yang relevan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*).³⁵

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi yang ketat terhadap fokus yang akan dikaji lebih lanjut, penajaman fokus, pembuatan ringkasan hasil pengumpulan data, dan pengorganisasian data, sehingga siap dianalisis lebih lanjut begitu selesai melakukan pengumpulan data secara keseluruhan.³⁶ Dalam proses ini, data yang diperoleh akan dikelompokkan sesuai dengan tema-tema

³⁴Rusidi, *Dasar-dasar Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Ilmu* (Bandung: PPS Unpad, 1992), 23.

³⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 242-251.

³⁶ Ibid.

yang ada di dalam penelitian ini. Dengan pengelompokan data tersebut, proses analisis data akan lebih mudah dilakukan karena sudah terklasifikasikan dalam tema-tema tertentu.

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Sedangkan penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data.³⁷ Setelah data dikelompokkan dalam tema-tema tertentu, peneliti akan menyajikan temuan-temuan tersebut kedalam bab-bab dengan tema-tema yang telah ditentukan. Setelah data yang ada disajikan kedalam bab-bab yang ada, peneliti akan memberikan analisa terhadap permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan menelaah isi serta maksud yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulisannya perlu diatur dan disistematisir ke dalam beberapa bentuk bab dan sub-bab. Sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup yang ada, maka pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama dengan beberapa sub-babnya. Secara kongkrit, lima bab tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Bab ini merupakan tanggung-jawab metodologis dari penelitian ini, di dalamnya peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan

³⁷ Ibid.

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan sedikit tentang kajian yang terkait dengan penelitian ini, kajian teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini menjelaskan tentang situasi dan kondisi politik di Indonesia pasca Orde Baru, yang meliputi hubungan Islam tradisionalis dengan negara pada masa Orde Baru, akhir pemerintahan Orde Baru, sistem politik yang berkembang pasca Orde baru, dan perkembangan partai politik pasca Orde Baru.

Bab III : Bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah dan perkembangan Islam Tradisionalis di Indonesia, yang meliputi asal usul dan basis Islam Tradisionalis, sejarah dan perkembangan Islam tradisionalis, serta pemikiran Islam Tradisionalis.

Bab IV : Bab ini merupakan penekanan utama dari penelitian ini. Di dalamnya terdapat penjelasan dan analisa tentang artikulasi politik Islam Tradisionalis di Indonesia pasca Orde Baru. Kemudian bab ini dibagi kedalam tiga bagian. Pertama, membahas ideologi politik Islam Tradisionalis. Kedua, membahas pemikiran politik Islam Tradisionalis pasca Orde Baru. Di bagian akhir, akan dibahas mengenai politik Islam tradisionalis, dulu, kini, dan esok.

Bab V : Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan, kemudian diikuti dengan saran atau rekomendasi

peneliti untuk sebuah tawaran solusi atas ketimpangan yang tengah terjadi pada permasalahan Politik Islam di Indonesia.

